

ETIKA BISNIS DALAM SISTEM PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA

2

Oleh : Imam Ghozali

Dengan disahkannya Perjanjian: GATT 1994 dan disetujuinya Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Marrakesh, Maroko pertengahan bulan April 1994 yang lalu, negara-negara di dunia memasuki suatu era baru dalam perdagangan internasional. Dengan liberalisasi perdagangan internasional diharapkan perdagangan dunia akan terus berkembang dan dengan demikian, kemakmuran optimal seluruh masyarakat dunia akan dapat dicapai.

Disepakatinya ketentuan internasional tersebut mengakibatkan seluruh anggota termasuk Indonesia harus meratifikasi peraturan perundangan yang diperlukan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam WTO. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Bagi Indonesia, dengan diberlakukannya WTO menimbulkan peluang dan ancaman yang untuk memanfaatkan atau menghadapinya diperlukan pendayagunaan kekuatan yang dimiliki dan upaya mengatasi kelemahan yang diikuti dengan upaya meningkatkan efisiensi disegala bidang.

Era perdagangan bebas atau globalisasi ini juga diikuti dengan kemajuan yang pesat dalam teknologi produksi, informasi dan komunikasi yang berawal dari negara maju. Melalui berbagai media elektronik setiap peristiwa di segala penjuru dunia pada saat yang hampir sama dapat disaksikan di mana saja dan oleh siapa saja. Perkembangan internet yang kini merambah di setiap pelosok dunia semakin memperluas informasi dan komunikasi. Segala macam produk buatan negara-negara maju juga dengan mudah dapat dilihat dilayar tv.

DENGAN disahkannya Perjanjian GATT 1994 dan disetujuinya Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Marrakesh, Maroko pertengahan bulan April 1994 yang lalu, negara-negara di dunia memasuki suatu era baru dalam perdagangan internasional. Dengan liberalisasi perdagangan internasional diharapkan perdagangan dunia akan terus berkembang dan dengan demikian, kemakmuran optimal seluruh masyarakat dunia akan dapat dicapai.

Disepakatinya ketentuan internasional tersebut mengakibatkan seluruh anggota termasuk Indonesia harus meratifikasi peraturan perundangan yang diperlukan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam WTO. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Bagi Indonesia, dengan diberlakukannya WTO menimbulkan peluang dan ancaman yang untuk memanfaatkan atau menghadapinya diperlukan pendayagunaan ke kuatannya yang dimiliki dan upaya mengatasi kelemahan yang diikuti dengan upaya meningkatkan efisiensi disegala bidang.

Era perdagangan bebas atau globalisasi ini juga diikuti dengan kemajuan yang pesat dalam teknologi produksi, informasi dan komunikasi yang berawal dari negara maju. Melalui berbagai media elektronik setiap peristiwa di segala penjuru dunia pada saat yang hampir sama dapat disaksikan dimana saja dan oleh siapa saja. Perkembangan internet yang kini merambah di setiap pelosok dunia semakin memperluas informasi dan komunikasi. Segala macam produk buatan negara-negara maju juga dengan mudah dapat dilihat dilayar tv.

Di pasar domestik, era

IMAM GHOZALI

Dosen Fakultas Ekonomi Undip. S1 Jurusan Akuntansi UGM, 1985. S2 bidang Professional Accounting dari University of New South Wales, Sydney, Australia, 1991. Meraih S3 bidang Advanced Management Accounting dari The University of Wollongong, Australia 1995. Sekarang Menjabat Direktur LPPS, Ketua Divisi Akuntansi Manajemen IAP dan Sekretaris IAI Cab. Jateng

globalisasi menyebabkan terjadinya proses internasionalisasi budaya yang berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Bahkan pola konsumsi itu secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi sistem produksi dan distribusi pendapatan dalam negeri. Persaingan antar produsen, baik sesama produsen domestik

maupun dengan produsen luar negeri akan semakin ketat dan berat.

Arus globalisasi kini dan masa yang akan datang merebak semakin dahsyat, didorong oleh kemajuan IPTEK yang luar biasa dan kesadaran warga dunia yang semakin kental untuk mencapai tatanan pergaulan dunia yang kondusif dibutuhkan kerjasama yang dilandasi rasa saling mempercayai dan saling membutuhkan secara konstruktif. Perkembangan IPTEK yang luar biasa ini berpengaruh luas pada sendi-sendi kehidupan umat manusia. Bukti empirik menunjukkan bahwa bangsa yang menguasai IPTEK tinggi mempunyai peluang yang semakin besar untuk merebut tempat terhormat dalam percaturan pergaulan politik, keamanan dan ekonomi internasional.

Perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat kampus rasanya tidak adil kalau hanya pandai mengungkapkan permasalahan dan kelemahan yang dihadapi serta menjunjung tinggi keunggulan bangsa lain tanpa mencari jalan keluarnya. Yang terpenting bagi dunia perguruan tinggi adalah bagaimana menyikapi dan berperan aktif mengadakan upaya nyata untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era globalisasi.

Salah satu masalah yang timbul adalah bahwa permasalahan

Pada era yang berkembang sangat cepat dan berorientasi pada masa depan, perlu adanya resistimatisasi dan reorientasi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi

yang dihadapi oleh perguruan tinggi umumnya dalam rangka menyongsong era globalisasi adalah bagaimana menyiapkan para mahasiswa dan civitas akademika untuk bisa akses ke pasar global. Apa yang harus dilakukan adalah mengembangkan konsep Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan tuntutan globalisasi. Pada era yang berkembang sangat cepat dan berorientasi pada masa depan, perlu adanya resistimatisasi dan reorientasi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pada umumnya perguruan tinggi dalam menyiapkan para mahasiswa untuk bisa akses ke pasar global hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar tenaga kerja semata tanpa memasukkan nilai etika dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu sinyalemen yang mengatakan bahwa sistem pendidikan (tinggi) kita telah tereduksi pada aspek

tertentu dan sangat parsial- bukan suatu hal yang perlu diragukan lagi. Kuntowidjojo (1991, 350) mengatakan bahwa reduksi itu mengarah pada pemenuhan kebutuhan pasar tenaga kerja dan politik. Secara eksplisit Kuntowidjojo mengatakan:

Lembaga-lembaga pendidikan tinggi misalnya telah berubah sekedar sebagai pelayan kepentingan-kepentingan bisnis dan politik. Dibukanya banyak program pendidikan profesional seperti MBA dan MM di beberapa perguruan tinggi negeri misalnya membuktikan bahwa tanpa disadari, lembaga pendidikan tinggi - alih-alih daripada melaksanakan cita-cita otonominya - malah terjebak sekedar untuk melayani kepentingan-kepentingan bisnis yang membutuhkan tenaga-tenaga profesional untuk melestarikan pengaruhnya dalam masyarakat.

Sinyalemen ini telah melanda sistem pendidikan secara umum dan merupakan indikasi yang nyata bahwa sistem yang ada sekarang hanya menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan profesionalisme semata.

Dengan dua perangkat utama ini yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan profesionalisme, produk lulusan yang dihasilkan diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Padahal seorang mahasiswa sebagaimana manusia lainnya adalah sosok

manusia yang menurut Feisal (1995, 174) tidak hanya dilengkapi dengan akal dan ketrampilan, tetapi juga dilengkapi oleh rasa, hati, kepribadian serta nilai abadi yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Pengertian manusia seutuhnya adalah manusia yang memasyarakat, adil, benar, jujur, harmonis dan secara alamiah mengakui Tuhan sebagai Pencipta, mengabdikan kepadaNya, gandrung untuk memaksimalkan potensi pribadinya, bertanggungjawab kepada sesama manusia dalam masyarakat.

Dalam kenyataannya, unsur-unsur yang terakhir ini yang merupakan wadah bagi terciptanya perilaku etis sering terlupakan dalam praktek sistem pendidikan tinggi kita. Akibatnya, bukanlah suatu hal yang aneh bila kepekaan rasa, hati, kepribadian, dan nilai tidak seimbang dengan unsur-unsur yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dan profesionalisme. Konsekuensi logis dari hal ini adalah terciptanya "split personality" dalam diri para lulusan perguruan tinggi kita.

Tulisan ini mencoba untuk mendiskusikan pemikiran-pemikiran ideal dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang dapat menghasilkan para lulusan yang memiliki nilai etika tinggi, berkepribadian yang utuh dan profesionalisme tinggi. Sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki, maka pembahasan akan saya

fokuskan pada bidang kajian bisnis khususnya etika bisnis.

ETIKA BISNIS

ARISTOTELES berbicara tentang etika dalam arti "hidup baik" (the good life) bagi individu yang diperoleh melalui keterlibatannya dengan masyarakat dimana individu tersebut berada. Jacques P. Thiroux (1985) menyatakan bahwa istilah "etika" dan "moral" sering dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama. Etika berasal dari kata "ethos", sebuah kata Yunani. Sedangkan moral asal katanya adalah "moralis", sebuah kata Latin. Keduanya dapat diartikan sebagai kebiasaan dan adat istiadat. Hanya dalam perkembangan selanjutnya, etika berkembang menjadi sebuah kajian filsafat tentang moral atau moralitas. Etika adalah suatu penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku. Pertanyaan utama dalam etika adalah tindakan dan sikap apa yang dianggap benar atau baik.

Apabila kita mencoba untuk mentransfer pengertian etika ini kedalam dunia bisnis, maka akan nampak bahwa pengertian etika telah hilang dalam praktek bisnis sehari-hari. Apa yang

dianggap sebagai "praktek bisnis yang baik" tidak secara otomatis mengandung pengertian bahwa kegiatan bisnis telah dilandasi oleh etika. Para pengusaha sekarang ini memandang bisnis dalam pengertian yang sempit dalam arti mereka mengabaikan aspek manusia, moral dan etika bisnis. Apabila kita bertanya kepada kalangan pengusaha tentang unsur-unsur bisnis yang baik, tentu jawabannya adalah kegiatan yang menguntungkan (profitable), memiliki basis konsumen yang kuat dsbnya.

Kelihatan sekali bahwa nilai-nilai etis saat ini tidak memiliki peran sama sekali dalam menjalankan usaha. Perolehan laba yang tinggi dan kontinuitas usaha merupakan hal utama yang harus dipertimbangkan di dalam merumuskan strategi dan perencanaan usaha. Ideologi klasik yang dikedepankan adalah satu-satunya tanggungjawab suatu bisnis adalah memaksimalkan laba untuk para

Apabila kita bertanya kepada kalangan pengusaha tentang unsur-unsur bisnis yang baik tentu jawabannya adalah kegiatan yang menguntungkan (profitable), memiliki basis konsumen yang kuat dan sebagainya

Menurut paham gereja saat itu yang mirip dengan sistem syariah bahwa menerima dan membayar bunga atas pinjaman adalah haram hukumnya

pemegang saham . Ideologi ini di ilhami oleh pendukung setia teori ekonomi neo klasik Milton Friedman (1980) yang menyatakan bahwa hanya ada satu tanggung-jawab sosial bagi dunia bisnis yaitu menggunakan sumberdaya dan melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka menaikkan laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Kaye pada tahun 1988 dan diulangi lagi pada tahun 1990 hasilnya mendukung pernyataan Milton Friedman tadi. Dalam penelitiannya terhadap 50 perusahaan terbesar di Australia, Kaye(1988, 1990) menemukan bahwa peranan etika dalam bisnis sungguh sangat kecil. Hanya sebagian kecil perusahaan yang menerapkan kode etik dan perusahaan yang menerapkan kode etik tersebut cenderung bersifat legalistik. Jadi sulit sekali membedakan antara etika atau

hukum dan tidak ada pengakuan pentingnya keterlibatan manusia atau kualitas manusia yang membedakan antara etika dengan kebutuhan hukum minimal. Karakteristik legal inilah yang membuat etika hanya sebagai satu peraturan yang didesain untuk melindungi organisasi dan bukan sebagai satu nilai yang mengarahkan perilaku.

SEJARAH PERKEMBANGAN ETIKA BISNIS

SECARA historis etika selalu dikaitkan dengan praktek-praktek sosial khususnya berkaitan dengan kepercayaan agama, sementara itu bisnis lebih menitik beratkan pada laba dan kekuasaan. Gejala ini makin nampak dengan adanya perkembangan teknologi lanjut dan ekspansi industry.

Jaman Mediaval (Abad Pertengahan) Eropa

Etika bisnis dalam sejarahnya lekat sekali dengan kepercayaan agama. Kalau kita menelusur kembali pada jaman medieval (pertengahan) Eropa dimana gereja begitu mendominasi kegiatan masyarakat sehari-hari, maka etika berbisnis pun diatur oleh gereja. Dari hasil penelitian sejarah ditemukan bahwa gereja secara konsisten memberlakukan canon law dalam kegiatan bisnis. Dalam canon law ini ada kesamaan aturan-aturan bisnis yang mirip dengan

sistem ekonomi syariah Islam. Pada jaman itu kegiatan bisnis merupakan kegiatan moralitas dan harus tunduk pada petunjuk dan hukum Tuhan. Menurut paham gereja saat itu yang mirip dengan sistem syariah bahwa menerima dan membayar bunga atas pinjaman adalah haram hukumnya. Satu-satunya cara berusaha adalah membentuk perusahaan perseorangan atau partnership (Karim dan Gambling, 1991). Dalam konteks ini seorang kapitalis harus ikut menanggung resiko kerugian. Gereja akan menghukum orang-orang yang melakukan usury (bunga) di Eropa sampai abad 15.

Walaupun kegiatan membungakan uang dilarang, tetapi para money-lender mendapatkan perlindungan tersendiri. Khususnya perlindungan ini datang dari para pangeran dan perusahaan pemerintah yang memandang meminjam uang dengan bunga adalah menguntungkan karena pemilik uang tidak ikut dalam partner usaha bisnis. Pada saat itu sudah muncul juga interpretasi terhadap bunga. Mereka juga sudah membedakan antara pinjaman untuk petani dan pengusaha. Pinjaman kepada yang miskin (petani) yang merupakan larangan Tuhan, sedang bagi para orang kaya atau pengusaha hal ini diperbolehkan karena mereka dapat mengatur kemampuan dirinya (Karim dan Gambling, 1991).

Dalam bidang akuntansi

yang merupakan bagian dari bisnis, etika nampak sekali diterapkan dalam praktek. Para bapak akuntansi seperti Benedetto Cotrugli (1458) dan Luca Pacioli (1494) yang sering disebut-sebut sebagai penemu double entry bookkeeping dalam tulisannya selalu mengkaitkan antara teknologi pencatatan dan keharusan melakukan perdagangan yang didasari spirit keagamaan. Mereka tidak memisahkan antara perilaku bisnis, peraturan pencatatan dan nilai-nilai keagamaan. Bagi Cotrugli, catatan pembukuan bukan saja mengungkapkan masalah perdagangan semata-mata, melainkan juga menjelaskan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Kristiani (Yamey, 1994).

Lebih jauh Cotrugli menyatakan bahwa pencatatan pembukuan harus selalu dikaitkan dengan moral conduct. Dalam salah satu bab bukunya, Cotrugli menyatakan beberapa larangan bagi para pedagang yaitu larangan berjudi, minum atau makan yang berlebihan, menemui dukun (wicked), berbohong yang digambarkan seperti logam yang disepuh emas (alchemy), bermain-main dan tidak serius (jousting), melakukan penyelundupan (smuggling), dan berlaku sombong (Yamae, 1994). Pentingnya masalah moral dalam pencatatan akuntansi juga ditandai dengan keharusan mengawali pencatatan pembukuan dengan menyebut nama Tuhan.

Cara penyebutan nama Tuhan pada saat itu ada berbagai macam. Misalnya in the name of God and Profit. Pada salah satu buku besar perusahaan milik Filippo Corbizzi, Jacopo Girolami dan Tommaso Corbizzi (1332-1357), Yamey (1974) menemukan beberapa cara penyebutan nama Tuhan sbb:

"In the name of God and of the blessed Virgin Mother Madonna St. Mary, and of St. John the Bapstist and the Evangelist and of all the Saints, male and female, of Paradise, that by their holy pity and mercy they will grant us grace for a holy, long, and good life, with growing honor and profit, and the salvation of our spirit and body" (dikutip dari Tjiptohadi, 1995).

TIMBULNYA KAPITALISME

DOMINASI gereja dalam bidang bisnis ternyata tidak dapat bertahan lagi karena munculnya perusahaan modern dengan skala usaha yang besar. Kegagalan gereja untuk memaksa aturan gereja pada kehidupan usaha ini telah memunculkan spirit sekularisasi dalam bidang bisnis. Publikasi dua tulisan Weber yaitu "The protestant Ethic and the Spirit Capitalism" (1904 dan 1905) mengawali studi tentang sejarah kapitalisme di Eropa.

Weber mengamati bahwa yang mendorong munculnya kapitalisme modern adalah para emigran Perancis pada abad 16 di Geneva yang kemudian diikuti oleh

masyarakat Puritan di Inggris dan Skotlandia. Masyarakat inilah para penganut Fundamentalist Protestant Theology Jean Calvin. Weber mengajukan hipotesa bahwa spirit kapitalisme di dorong oleh interpretasi ekstrim Calvin terhadap konsep "Christian Calling" yang di kemukakan oleh Martin Luther King. Konsep "Christian Calling" menyatakan bahwa jalan satu-satunya yang akan diterima oleh Tuhan, bukannya melampaui moralitas duniawi dengan menjalani hidup yang menjauhi kesenangan jasmani di biara, melainkan dengan melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada tiap-tiap individu, sesuai dengan posisinya di dunia ini. (Dawam Rahardjo, 1990).

Lebih jauh Dawam Rahardjo menyatakan bahwa ajaran Calvin yang sangat bertentangan dengan ajaran Katolik mengartikan panggilan (calling) berkaitan erat dengan doktrin takdir. Dalam pandangan Calvin, takdir yang menyangkut keselamatan seseorang itu sudah dipastikan oleh Tuhan, tetapi tidak diketahui oleh orang yang bersangkutan. Menghadapi situasi seperti ini Calvinisme mengajarkan agar setiap orang merasa dirinya "terpilih" untuk mendapatkan keselamatan, dengan cara menghilangkan kebimbangan dan godaan setan, karena kekurangan percayaan bahwa dirinya sebagai orang yang terpilih adalah akibat dari lemahnya iman dan pertanda

dari kurang rahmat Tuhan. Melaksanakan kewajiban dengan kerja keras dalam kehidupan dunia adalah jalan satu-satunya untuk membangun dan memperoleh kepercayaan diri, menghilangkan kebimbangan religius dan memberi kepastian adanya rahmat Tuhan pada dirinya.

Ajaran ini menimbulkan proses rasionalisasi terhadap gejala dan kegiatan duniawi yang berakibat penghapusan usaha-usaha yang bersifat magis, yaitu melakukan manipulasi terhadap hal-hal yang bersifat supernatural yang berdasarkan superstisi. Kaitannya dengan timbulnya kapitalisme modern adalah, bahwa konsekuensi dari ajaran Etik Protestantisme tersebut memberi dasar kultural bagi dilakukannya tindakan-tindakan kalkulasi, pengukuran dan kontrol terhadap setiap tindakan manusia. Calvin terus terang mengakui adanya kebutuhan modal, kredit perbankan, perdagangan berskala besar dan sistem keuangan. Kerja keras, kerajinan, kemandirian dan kelugasan, menurut Calvin adalah nilai-nilai Kristiani, sedangkan laba dan bunga bank tidak seluruhnya dan tidak sepenuhnya haram.

Pandangan Calvin inilah yang melanda Eropa pada saat itu yang dengan sendirinya meninggalkan ajaran-ajaran gereja katolik. Hanya dalam perkembangan kapitalisme lebih lanjut, Etik Protestantisme akhirnya juga

disingkirkan dalam pertimbangan-pertimbangan hisnis seperti yang kita lihat sekarang ini. Kegiatan bisnis sekarang ini jelas-jelas berjalan dengan konsep sekular tanpa memandang lagi ajaran-ajaran agama.

ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF

JIKA kita lihat saat ini tak satupun negara yang telah secara totalitas menjalankan kegiatan ekonominya atas dasar ajaran Islam. Yang menjadi pertanyaan kita adalah mampukah Islam menjadi alternatif untuk mengembangkan etika bisnis? jawabannya tergantung kepada keimanan kita. Namun demikian, Islam memiliki perbedaan-perbedaan mendasar dibandingkan dengan ajaran Kristiani dan Humanisme. Ajaran Kristiani memandang Homo sapiens sebagai makhluk yang jatuh dari surga (kejatuhan Adam di bumi dari surga) sementara itu humanisme memandang manusia secara naluri adalah makhluk yang egois. Keadaan bisnis yang sekular sekarang ini beranggapan bahwa interes-teres pribadi seperti disebutkan tadi akan mengatur dirinya sendiri atau dikendalikan oleh kekuatan politik tertentu.

Islam menolak pemisaham antara kegiatan keagamaan dengan kegiatan non-agama (kegiatan ekonomi). Namun demikian, tidak berarti bahwa Islam menganjurkan

negara teokratik yang didominasi oleh kelompok pendeta. Pendeta seperti yang dimengerti oleh agama lain tidak terdapat di dalam Islam. Semua manusia adalah sama di hadapan Allah dan yang membedakan hanyalah tingkat keimanan seseorang. Islam bukan sekedar agama dan aturan keagamaan, tetapi Islam adalah agama yang menyajikan dan melengkapi pandangan hidup (way of life) yang terintegrasi dengan diikuti penjelasan aturan (codes) yang mencakup segala aspek kehidupan dunia, misalnya masalah sosial, ekonomi, budaya dan politik dalam masyarakat (lihat Dawam Rahardjo, 1990). Masalah ekonomi dalam Islam harus dilihat dalam kerangka total yaitu "Islamic ideology" yang mempunyai arti bahwa semua pelaku ekonomi apakah pengusaha, akuntan, konsumen, supplier dstnya dalam menjalankan kegiatannya harus berpedoman pada syariah islam seperti yang tercantum dalam Al Qur'an dan Hadits.

Beberapa firman Allah yang dapat dipakai sebagai pedoman dasar yaitu Al Qur'an 9:60; 2:275-279; 3:130; 4:161; 30:39 yang mengatur tentang kewajiban zakat dan dilarangnya riba sebagai pengatur perekonomian. 11:85; 83:1 yang mengatur tentang etika bisnis dan 2:282 yang mengatur kewajiban

Apa yang bisa dilakukan oleh dunia perguruan tinggi tidak lain adalah menyiapkan para mahasiswa bekal untuk berperilaku selalu menjunjung nilai etika maupun moralitas kejak nanti apabila bekerja

melakukan pencatatan hutang piutang.

SISTEM PENDIDIKAN / KURIKULUM

URAIAN tentang perkembangan etika bisnis diatas jelas sekali menunjukkan bagi kita bahwa nilai etika selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Nilai etika bisnis yang pada awalnya lekat sekali dengan ajaran agama ternyata dalam perkembangan selanjutnya meninggalkan ajaran-ajaran agama dan mengalami sekularisasi. Bahkan etika berbisnis saat ini sudah tidak mempertimbangkan lagi aspek-aspek moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Munculnya keserakahan dalam praktek sehari-hari sudah menjadi hal biasa. Penggundulan hutan dan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, praktek menghalalkan segala cara tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moralitas dan agama sangat lekat

dengan kehidupan sehari-hari.

Menjadi kewajiban kita semua untuk menumbuhkan nilai etika dan moral dalam kehidupan berbisnis di negara tercinta ini. Apa yang bisa dilakukan oleh dunia perguruan tinggi tidak lain adalah menyiapkan para mahasiswa bekal untuk berperilaku selalu menjunjung nilai etika maupun moralitas kelak nanti apabila bekerja. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan pembenahan kurikulum dalam sistem pendidikan tinggi.

Sistem pendidikan adalah sebuah instrumen yang secara langsung memberikan bentuk pada produk akhir. Sementara sistem yang ada pada saat ini, seperti yang disinyalir oleh Kuntowidjojo (1991) di atas, telah dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi permintaan pasar. Untuk itu sistem pendidikan yang dalam skala mikro direfleksikan dalam bentuk kurikulum, secara teknis seyogyanya mengandung unsur-unsur seperti: keterpaduan (integritas), kesatuan (sistemik), kesemestaan (ekologik), dan kelenturan (fleksibilitas). Sedangkan tujuan kurikuler dan instruksional yang terkandung dalam sistem pendidikan diarahkan kepada peningkatan ketakwaan, kepribadian, kepekaan rasa, intelektual, dan keterampilan (profesionalisme).

Disatu sisi, sistem tersebut menekankan pada wawasan keilmuan dan profesionalisme yang luas, utuh, dan integral. sedangkan

pada sisi yang lain, secara seimbang juga menekankan pada peningkatan kesadaran diri tentang hakekat manusia sebagai makhluk yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Unsur ketakwaan inilah yang sebetulnya merupakan basis bagi berdiri tegaknya perilaku etis dalam setiap langkah kehidupan sehari-hari. Sistem semacam ini dengan kata lain mencoba memadukan kekuatan akal (fakultas pikir) dalam menerima, mengembangkan, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta sekaligus memadukannya dengan kekuatan hati nurani (fakultas zikir) yang selalu cenderung pada kebenaran. Perpaduan ini akan memancarkan kekuatan bagi manusia yang bersangkutan dalam bentuk tindakan yang membawa rahmat dan bukan tindakan yang membawa kerusakan sosial maupun lingkungan.

Unsur keterpaduan (integritas), kesatuan (sistemik), kesemestaan (ekologik), dan kelenturan (fleksibilitas) adalah unsur yang harus ada. Keberadaan mereka dalam sistem pendidikan ini akan memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan kepribadian yang utuh. Unsur-unsur tersebut secara teknis dan ideal terkait dengan mata kuliah yang diberikan pada mahasiswa. Sementara ini kita dapat melihat bahwa unsur-unsur ini kurang mendapat perhatian dalam sistem pendidikan kita. Sebagai contoh, kita lihat beberapa

mata kuliah seperti Pancasila, Agama, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Alamiah dasar adalah mata kuliah yang dari aspek materinya terlihat terpisah dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan disiplin ilmu bisnis. Keadaan yang demikian ini menunjukkan salah satu kelemahan dari sistem pendidikan kita. Yaitu, ketidakmampuan kita meramu materi mata kuliah ke dalam bentuk yang satu, terpadu, dan apalagi ekologis.

Sistem pendidikan kita sebetulnya harus mampu secara kritis dan inovatif meramu materi mata kuliah tersebut di atas sehingga terkait erat dengan disiplin ilmu yang sedang kita pelajari. Materi kuliah Agama dan Pancasila dapat secara kreatif diramu sehingga materi kedua mata kuliah ini merupakan bagian yang mengandung nilai "etika bisnis". Materi mata kuliah ini akan menjadi penyeimbang bagi mata kuliah bisnis yang boleh dikata kering akan

nilai-nilai etika. Dengan materi semacam ini jelas akan sangat membantu mahasiswa untuk bersikap dan berpribadi utuh.

Sedangkan Ilmu Budaya Dasar dapat diramu sedemikian rupa sehingga materi mata kuliah ini mengandung kajian-kajian tentang nilai-nilai budaya bisnis lokal yang bersifat keIndonesiaan dan juga mengkaji cara bisnis bangsa-bangsa lain. Dengan memberikan materi semacam ini, sistem pendidikan kita dapat memberikan suatu pengertian kepada mahasiswa bahwa nilai-nilai bisnis lokal juga mempunyai keunggulan (disamping kelemahannya) yang perlu juga dipraktekkan dalam dunia bisnis. Disamping itu, materi mata kuliah ini juga memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang praktek-praktek bisnis yang dilakukan oleh bangsa lain di dunia internasional. Pengetahuan ini sangat penting untuk memberikan bekal bagi

mahasiswa agar bila kelak ia telah lulus dan praktek dalam dunia bisnis dapat menyusun strategi berbisnis yang baik dengan bangsa lain. Materi mata kuliah ini juga memberikan suatu pengertian bahwa, misalnya, perusahaan adalah institusi yang selalu terlibat dalam interaksi sosial. Ini artinya adalah bahwa

Aspek lain yang berhubungan dengan unit-unit aktivitas mahasiswa seperti unit aktivitas seni, sosial, lingkungan (pecinta alam), ilmiah dan lain-lainnya juga harus bersifat integral dalam sistem pendidikan

perusahaan tidak bisa terlepas dan memisahkan diri dari lingkungan sosialnya. Hal ini juga mempunyai implikasi bahwa perusahaan atau praktek bisnis tidak boleh merugikan masyarakat sekelilingnya.

Kemudian, materi mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar harus memberikan pengertian dasar tentang alam sebagai sumber daya yang harus dikelola secara hati-hati. Artinya, praktek bisnis tidak dapat secara sewenang-wenang mengeksplotasi alam untuk kepentingan pemegang saham (pemilik perusahaan) semata. Karena bila demikian, keseimbangan alam akan menjadi rusak. Kerusakan alam ini tidak saja merusak alam itu sendiri, tetapi dapat juga merusak kehidupan manusia secara umum. Demikian juga proses produksi perusahaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan adanya pencemaran lingkungan yang akhirnya akan merusak alam.

Aspek lain yang berhubungan dengan unit-unit aktivitas mahasiswa seperti unit aktivitas seni, sosial, lingkungan (pecinta alam), ilmiah dan lain-lainnya juga harus bersifat integral dalam sistem pendidikan. Unit aktivitas seni, misalnya, tidak dijadikan aktivitas yang bersifat hura-hura atau sekedar enjoyment bagi mahasiswa, tetapi seni hendaknya menjadi alat bagi mahasiswa untuk mengasah perasaan (feelings) menjadi

perasaan yang halus, sensitif terhadap keindahan dan lembut. Perasaan semacam ini sangat diperlukan dalam dunia bisnis (dan dalam kehidupan sehari-hari). Karena, dengan perasaan semacam ini, kepribadian seseorang akan semakin halus, cinta keindahan, kerapian, serta respek terhadap orang lain. Kepribadian semacam ini tentu akan berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki perasaan. Karena seseorang yang tidak memiliki perasaan ini, dalam dunia bisnis, juga tidak akan menggunakan perasaan. Dengan kata lain, ia tidak akan pernah menggunakan etika dalam berbisnis.

PENUTUP

URAIAN di atas merupakan ilustrasi umum atas kondisi sistem pendidikan tinggi bisnis di Indonesia yang disinyalir telah tereduksi pada aspek bisnis dan politik semata. Pereduksian semacam ini jelas menghilangkan hakikat manusia itu sendiri yang sebetulnya eksistensi dirinya terletak pada perpaduan yang seimbang dan harmonis antara fakultas pikir dan zikir. Sudah selayaknya sistem pendidikan tinggi bisnis tidak terperangkap dalam masalah ini. Saat ini telah tiba waktunya bagi kita untuk bangkit melakukan pembenahan atas sistem yang sedang berlaku berdasar pada nilai-nilai etika yang positif. Hal ini

dapat dilakukan dengan memodifikasi materi mata kuliah yang berprinsip pada keterpaduan, kesatuan, ekologi, dan kelenturan yang merupakan unsur sangat

penting dalam upaya membentuk kepribadian manusia. Oleh karena itu, prinsip ini sama sekali tidak dapat diabaikan dalam sistem pendidikan tinggi bisnis.☺

REFERENSI

- Feisal, Jusuf Amir. 1995. **Reorientasi Pendidikan Islam**. Gema Insani Press. Jakarta
- Friedman, Milton. 1980. **Free To Choose**. MacMillan Publication Comp. Melbourne
- Karim, Abdel dan Gambing, Trevor. 1991. **Business and Accounting Ethics in Islam**. Mansell. London.
- Kaye, B.N. 1992. Codes of Ethics in Australian Business Corporations. **Journal of Business Ethics**.
- Kuntowidjojo, K. 1991. **Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi**. Mizan. Bandung
- M Dawam Rahardjo. 1990. **Etika Ekonomi dan Manajemen**. Tiara Wacana.
- Thiroux, P Jacques. 1985. **Philosophy: Theory and Practice**. MacMillan Publication Comp. New York.
- Tjiptohadi Sawarjuwono. 1995. **Aplikasi Nilai-Nilai Islam ke dalam Standar Akuntansi Keuangan, Perlukah?**. Media Akuntansi No 08/THN II.

